



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah komunikasi dan partisipasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan kebijakan, standar pelayanan, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat desa dan seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen hasil Forum Konsultasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan. Semoga hasil forum ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat desa. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Sumbawa, Juli 2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sumbawa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan dan Manfaat	5
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	7
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	7
2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP	7
2.2.1 Penyelenggara	7
2.2.2 Peserta FKP	7
2.2.3 Metode Pelaksanaan FKP.....	8
2.2.4 Susunan Acara FKP	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP	9
3.1 Identifikasi Masalah.....	9
3.2 Rencana Aksi.....	11
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, evaluasi, dan perbaikan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat diperoleh masukan, saran, kritik, dan rekomendasi yang konstruktif terhadap berbagai aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan yang ada di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, salah satunya layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/ layanan Konsultasi BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan usaha produktif yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, legalitas, pengawasan, maupun kapasitas sumber daya manusia pengelola. Beberapa BUMDes belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), belum berbadan hukum, lemahnya fungsi pengawasan internal, serta belum optimalnya pengelolaan usaha dan keuangan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, khususnya pada layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi wadah untuk memperoleh masukan, saran, dan rekomendasi dari masyarakat maupun stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas layanan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari FKP ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes.
- b. Menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan.

- c. Menyusun langkah-langkah perbaikan layanan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap BUMDes.

Adapun manfaat FKP ini sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.
- b. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan BUMDes.
- c. Terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping desa, dan pengelola BUMDes.
- d. Tersusunnya rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil konsultasi publik.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 membahas berbagai aspek layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes yang meliputi:

- 1. Penguatan kelembagaan BUMDes.
- 2. Penyusunan dan penetapan AD/ART BUMDes.
- 3. Legalitas dan badan hukum BUMDes.
- 4. Pengawasan internal BUMDes.
- 5. Pengelolaan usaha dan keuangan BUMDes.
- 6. Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes.
- 7. Sinergi pembinaan antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping desa.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

Waktu : 14.00 WITA- Selesai

Tempat : Aula DPMD Kab. Sumbawa

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP

2.2.1 Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes.

2.2.2 Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pemangku kepentingan pelayanan publik, antara lain:

1. Pejabat struktural Dinas PMD Kabupaten Sumbawa.
2. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
4. Perwakilan pemerintah kecamatan.
5. Pengurus dan pengelola BUMDes.
6. Unsur pemerintah desa.
7. Pemangku kepentingan terkait lainnya.

2.2.3 Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Paparan materi oleh narasumber.
2. Penyampaian kondisi eksisting layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes.
3. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.
4. Identifikasi permasalahan layanan.
5. Penyampaian saran dan rekomendasi perbaikan.
6. Penyusunan rencana tindak lanjut hasil forum..

2.2.4 Susunan Acara FKP

Adapun susunan acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

No	Waktu	Kegiatan
1.	14.00-14.15	Registrasi Peserta
2.	14.15- 14.20	Pembukaan Acara
3.	14.20-14.25	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4.	14.25-14.55	Sambutan Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa
5.	14.55-15.45	Pemaparan Materi Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes
6.	15.45-16.15	Diskusi dan Konsultasi Publik
7.	16.15-16.30	Penyampaian Saran dan Masukan Peserta
8.	16.30-16.45	Penyusunan Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut
7.	16.45-16.50	Penandatanganan Berita Acara
8.	16.50-16.55	Doa
9.	16.55-17.00	Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil diskusi dan masukan peserta Forum Konsultasi Publik, diperoleh beberapa permasalahan utama dalam layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes sebagai berikut:

A. Aspek Kelembagaan

1. Masih banyak BUMDes yang belum memiliki AD/ART sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Struktur organisasi dan kepengurusan BUMDes belum lengkap.
3. Fungsi pengawas BUMDes belum berjalan optimal.

B. Aspek Legalitas

1. Masih rendahnya jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum.
2. Banyak BUMDes yang belum memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh badan hukum.

C. Aspek Pengelolaan dan Usaha

1. Pengelolaan usaha BUMDes belum profesional.
2. Terdapat BUMDes yang mengalami kemacetan usaha dan permasalahan pengelolaan modal.
3. Belum optimalnya kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

D. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes masih perlu ditingkatkan.
2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola BUMDes.
3. Belum tersedianya program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

E. Aspek Pembinaan dan Pendampingan

1. Koordinasi antar pihak terkait masih perlu diperkuat.
2. Belum adanya pemetaan prioritas BUMDes yang menjadi fokus pembinaan.

3. Keterbatasan anggaran pembinaan di tingkat desa.

3.2 Analisis

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik, permasalahan yang terjadi pada layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes menunjukkan bahwa sebagian besar kendala masih berpusat pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes.

Dari aspek kelembagaan, masih banyak BUMDes yang belum memiliki dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta struktur kepengurusan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya dasar hukum dalam pelaksanaan operasional BUMDes, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembagian hasil usaha, dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dari aspek pengawasan, fungsi pengawas internal BUMDes belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pemahaman pengawas terhadap tugas dan fungsi pengawasan serta belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Akibatnya, berbagai permasalahan dalam pengelolaan usaha dan keuangan BUMDes sering terlambat terdeteksi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi BUMDes maupun desa.

Pada aspek legalitas, masih rendahnya jumlah BUMDes yang telah memperoleh badan hukum menunjukkan bahwa proses pemenuhan persyaratan administrasi belum berjalan maksimal. Padahal status badan hukum sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan mitra usaha, memperluas akses permodalan, dan memperkuat posisi BUMDes dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Sementara itu, dari aspek pengelolaan usaha, ditemukan bahwa beberapa BUMDes belum mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan. Sebagian besar masih menghadapi kendala dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pengembangan

bisnis. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes masih memerlukan penguatan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, tata kelola organisasi, administrasi, dan pengelolaan usaha menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja BUMDes.

3.3 Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik, disusun rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	BUMDes belum memiliki AD/ART	Fasilitasi penyusunan dan penetapan AD/ART melalui Musyawarah Desa	Meningkatnya jumlah BUMDes yang memiliki AD/ART yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa sesuai ketentuan yang berlaku	Tahun 2026	DPMD, Pemerintah Desa, Pendamping Desa
2.	Rendahnya jumlah BUMDes berbadan hukum	Pendampingan percepatan pengurusan badan hukum	Meningkatnya jumlah BUMDes yang memperoleh sertifikat badan hukum	Tahun 2026	DPMD, Pendamping Desa

3.	Lemahnya fungsi pengawasan	Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas BUMDes	Pengawas BUMDes memahami tugas dan fungsi pengawasan serta tersedianya laporan hasil pengawasan secara berkala	Tahun 2026–2027	DPMD
4.	Rendahnya kapasitas pengurus	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen BUMDes	Meningkatnya kompetensi pengurus BUMDes yang ditunjukkan melalui penerapan tata kelola dan administrasi yang lebih baik	Tahun 2026–2027	DPMD dan Stakeholder terkait
5.	Kurangnya koordinasi pembinaan	Pembentukan mekanisme koordinasi dan monitoring berkala	Terlaksananya rapat koordinasi secara berkala dan meningkatnya sinergi dalam pembinaan BUMDes	Tahun 2026	DPMD, Kecamatan, Pendamping Desa

6.	Belum adanya BUMDes unggulan yang menjadi prioritas binaan	Identifikasi dan penetapan BUMDes potensial untuk dibina dan dikembangkan menjadi BUMDes unggulan	Tersusunnya daftar BUMDes prioritas dan meningkatnya kinerja usaha BUMDes yang menjadi sasaran pembinaan	Tahun 2026–2027	DPMD dan Pemerintah Desa
7.	Keterbatasan anggaran pembinaan	Mendorong pengalokasian anggaran peningkatan kapasitas dalam APBDes	Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas BUMDes dalam dokumen APBDes	Tahun 2026–2027	Pemerintah Desa dan Kecamatan

BAB IV PENUTUP

Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 pada Layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan berbagai masukan, saran, serta rekomendasi yang konstruktif dari para peserta. Hasil forum menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait aspek kelembagaan, legalitas, pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi pembinaan BUMDes.

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan terbangun komitmen bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, pemerintah desa, pendamping desa, pengelola BUMDes, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes.

Masukan dan rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan serta program pembinaan yang lebih efektif, sehingga BUMDes dapat berkembang secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Semoga hasil Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sumbawa Besar, Juli 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sumbawa



ULUMUDDIN, S.E

NIP. 19720629 199703 1 005

LAMPIRAN Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Bungur Nomor 3 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat 84316, Telp. (0371) 625004/21503
<https://dpmd.sumbawakab.go.id>

Sumbawa Besar, 15 Juni 2026

Nomor : 400.10 / 243a/DPMD/2026
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kepada

Yth. _____
di - _____
Tempat _____

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, khususnya pada layanan **Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes**. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

Waktu : 14.00 WITA- Selesai

Tempat : Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa

Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sumbawa


ULUMUDDIN, S.E
NIP. 19720629 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Bungur Nomor 3 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat 84316, Telp. (0371) 625004/21503
<https://dpmd.sumbawakab.go.id>

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES/ LAYANAN KONSULTASI BUMDES
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

Pada hari ini, Jum'at 19 Juni Tahun 2026, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Layanan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes/Konsultasi BUMDes yang dihadiri oleh unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pengurus BUMDes, serta pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan hasil diskusi, konsultasi, dan penyampaian masukan dari peserta, diperoleh beberapa identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

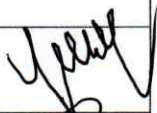
NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Masih banyak BUMDes yang belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).	Melakukan fasilitasi penyusunan dan penetapan AD/ART melalui Musyawarah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	6 Bulan
2.	Struktur organisasi dan kepengurusan BUMDes belum lengkap.	Melakukan penataan dan pelengkapan struktur organisasi serta penetapan pengurus melalui Musyawarah Desa.	6 Bulan
3.	Fungsi pengawas internal BUMDes belum berjalan optimal.	Melaksanakan pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas BUMDes serta penyusunan mekanisme pengawasan berkala.	1 Tahun
4.	Masih rendahnya jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum.	Melakukan pendampingan dan fasilitasi percepatan pengurusan badan hukum BUMDes.	1 Tahun
5.	Kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan usaha dan administrasi masih terbatas.	Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen kelembagaan, administrasi, dan pengelolaan usaha BUMDes.	1 Tahun
6.	Kurangnya pemahaman pengurus dan pemerintah desa terhadap regulasi BUMDes.	Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi regulasi terkait pengelolaan BUMDes secara berkala.	1 Tahun
7.	Belum optimalnya pengelolaan usaha dan keuangan BUMDes.	Melakukan pendampingan tata kelola usaha dan keuangan yang akuntabel serta berbasis potensi desa.	1 Tahun
8.	Belum optimalnya kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).	Mendorong pengembangan unit usaha produktif dan peningkatan kapasitas bisnis BUMDes.	2 Tahun
9.	Belum tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes.	Mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran peningkatan kapasitas BUMDes dalam APBDes.	Mulai Tahun Anggaran Berikutnya
10.	Masih terdapat BUMDes yang mengalami permasalahan pengelolaan modal dan usaha.	Melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan khusus terhadap BUMDes yang mengalami kendala usaha.	1 Tahun

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Sumbawa, 19 Juni 2026

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	AMIRINSYAH, S.E		L	KOORDINATOR TTM	
2.	AMIR ALI	087899370111	L	TENAGA AHLI KOORDINATOR KABUPATEN	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa  Ulumuddin, S.E NIP. 19720629 199703 1 005	Penyelenggara Pelayanan,  Sanapiyah, S.E., M.Ak NIP. 19791010 200701 1 017
--	---

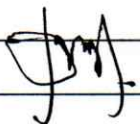
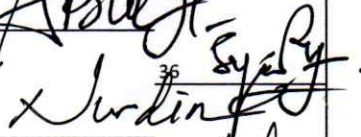
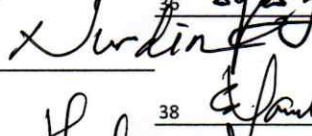
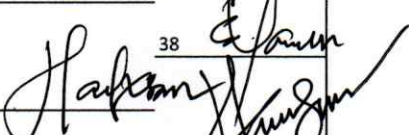
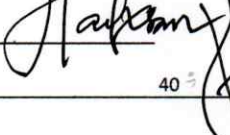
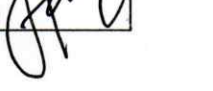
*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Bungur No. 3 Telp. (0371) 625004 / 21503 Sumbawa Besar

Kegiatan : Konsultasi Publik : Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes / Layanan Konsultasi BUMDes
 Hari, Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
 Tempat : Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	ULUMUDDIN	KADIS	SBW	L	1
2	I Made Patrya	Sekdis	Sbw	L	2
3	EVI ANORIANI	Kabid PUKD	Sbw	P	3
4	SAHAPIAH	Kasubag Program	Sbw	L	4
5	IBRAHIM	ANALIS KEBIJAKAN	SBW	L	5
6	KURNIAWANSYAH	TTM	SBW	L	6
7	Maulana Rabbany	TTM	Sbw	L	7
8	Syamsul Hidayat	TTM	Sbw	L	8
9	Sultan Samer	TTM	Sbw	L	9
10	Chandra Oktasaputra	TTM	Sbw	L	10
11	Dedi wahyudi	TTM	Sbw	L	11
12	Syarif Mustaan	TTM	Sbw	L	12
13	Vivian Fitriyani	TPP Kab	Sbw	P	13
14	Jhan Kenedi	TTM	Sbw	L	14
15	Amir Ali	TPP. Kab	Sbw	L	15
16	Amirinsyah	TTM	Sbw	L	16
17	SUSI HARWATI	TTM	SBW	P	17
18	EVI MURJAYANTI	TTM	SBW	P	18
19	WIDYA INDRYANI	TTM	SBW	P	19
20	WINDA NUR RISKIYAH	TTM	SBW	P	20
21	Heny Kamsianj	TTM	Sbw	P	21
22	Irwani tahmi	TTM	Sbw	L	22
23	HENDRA IRAWAN	KABID PEMDES	SBW	L	23
24	MURAHMAD	Staf	SBW	L	24
25	Densy Nara Hamri	Staf	Sbw	P	25
26	NURMAHESITH	Staf	SBW	P	26
27	Makhlis Dompasano	Kab Penatram	Sbw	L	27
28	Matarani	Staf	Sbw	P	28
29	SUSILAWATI	SOSBUD	SBW	P	29
30	R. ADELIA	PUBKID	Sbw	L	30

31	MARIATIL	PUEKD	SBW	P	31	
32	M. Saleh	Kades Kelumpang	Kelumpang	L	32	
33	Syafaruddin	Kades Marga	Marga	L	33	
34	M. SIDIK	Kades Makong	Makong	L	34	
35	ABDUL HAMID	KADES BARUTAHAN	BARUTAHAN	L	35	
36	SYARIFUDDIN	KADES NIJANG	NIJANG	L	36	
37	Nurdin	Kades Petat	Petat	L	37	
38	Syamsuddin	Kades Phealoka	Phealoka	L	38	
39	H. HAK SAN	Kades Empang Bawa	Empang Bawa	L	39	
40	HAMSUN	KADES SIMU	SIMU	L	40	



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



SANAPIAH, SE., M.Ak
NIP. 19791010 200701 1 017